BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan negara yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2045. Hal ini mencerminkan cita-cita nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, serta pembangunan yang merata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur (Nango et al., 2025). Generasi muda merupakan penerus bangsa yang membutuhkan penguatan karakter agar mampu berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik dan mendukung kemajuan dan pembangunan nasional (Devi et al., 2024)**.**

Meskipun Indonesia memiliki visi besar dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, namun kondisi kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang serius dan perlu mendapat perhatian penuh. Gizi yang baik memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan tubuh, kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, serta menjaga kesehatan secara menyeluruh sehingga seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Sebaliknya, kekurangan asupan gizi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Gizi buruk terjadi akibat kekurangan asupan nutrisi dan berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan mental (Juliana et al., 2022).

Berdasarkan data dari peringatan Hari Gizi Nasional 2025 menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang pada balita mencapai 8,5%, anemia pada remaja 16,3% dan ibu hamil 27,7% serta meningkatnya

overweight pada remaja 12,1%, konsumsi minuman manis mencapai 52%, makanan instan 11% dan penggunaan penyedap rasa tercatat 78% serta kebiasaan tidak sarapan pagi mencapai 65% pada sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pola makan dan pemenuhan gizi yang optimal merupakan kebutuhan krusial karena berpengaruh langsung terhadap energi, konsentrasi belajar, kesehatan, serta kemampuan generasi muda (Harsono, 2025).

Permasalahan gizi buruk di Indonesia menjadi faktor utama penyebab terjadinya stunting, hal ini tentu bertolak belakang dengan perwujudan Indonesia emas 2045. Stunting merupakan permasalahan gizi yang serius dan masih banyak terjadi, khususnya di negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan prevalensi stunting tinggi, berdasarkan data World Bank pada tahun 2023 tercatat Indonesia berada di peringkat ketiga dunia mencapai 22%. Selain itu, WHO menyebutkan juga bahwa secara global sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting (Ilham, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan pertumbuhan anak masih menjadi tantangan serius dalam kesehatan dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis dan terkoordinasi.

Permasalahan stunting tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi tantangan nasional dan pemerintah kota. Tingginya kasus stunting di wilayah perkotaan menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada perkembangan dan potensi generasi di masa depan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya penanganan dan pencegahan stunting, salah satunya melalui penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah.

Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, balita, dan ibu hamil sebagai kelompok prioritas. Alokasi anggaran awal untuk program Makan Bergizi Gratis ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 melalui Badan Gizi Nasional sebesar 71 triliun, yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh indonesia serta menjangkau jutaan penerima manfaat. (Irawati, 2026).

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), program MBG ini ditetapkan sebagai salah satu program prioritas utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 335 triliun.

Tabel 1
Anggaran Program MBG Tahun 2026

No.	Sektor Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	Persentase (%)
1.	Pendidikan	Rp. 223 triliun	83,4%
2.	Kesehatan	Rp. 24,7 triliun	9,2%
3.	Ekonomi	Rp. 19,7 triliun	7,4%

Sumber: Detik.com, diolah oleh Penulis 2026

Berdasarkan data APBN Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun dengan target 82,9 juta penerima sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 268 triliun dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan sebagian besar difokuskan pada program pemenuhan gizi. Sebagian dari anggaran dibagi ke dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan total sekitar Rp 267,4 triliun,

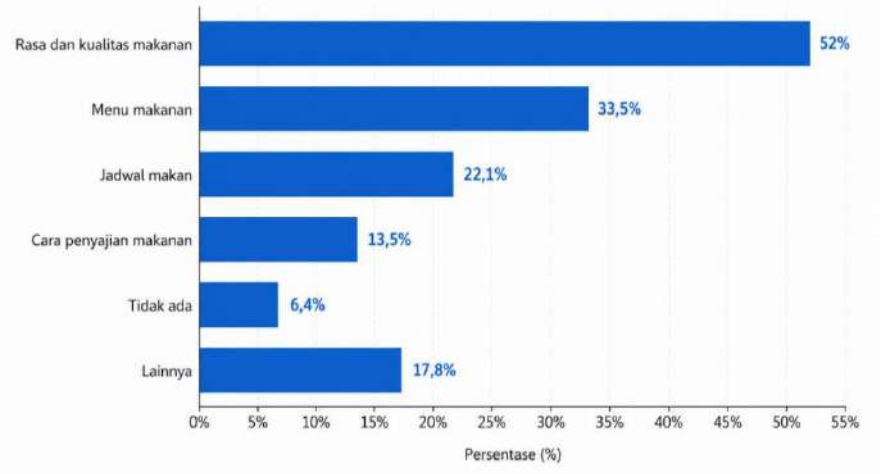
dimana sektor pendidikan memperoleh alokasi tersebar. Selain untuk penyediaan makanan, anggaran MBG juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pendukung, sehingga program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian (Zulfikar, 2025).

Meskipun dirancang sebagai program strategis nasional, dalam pelaksanaan awal program MBG menghadapi sejumlah masalah yang mendasar. Salah satu isu yang banyak menjadi sorotan adalah sumber pembiayaan program sebagian besar berasal dari alokasi anggaran pendidikan. Kondisi ini memicu perdebatan di masyarakat, mengingat bahwa sektor pendidikan memiliki kebutuhan yang sangat kompleks dan berkelanjutan. Penggunaan dana pendidikan untuk mendanai program MBG ini memunculkan pro dan kontra, terutama karena dana yang digunakan dari anggaran pendidikan nilainya sangat besar.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama dalam struktur belanja negara. Jumlahnya hampir setara dengan total dana untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang mencapai 274,7 triliun, serta jauh lebih besar daripada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 64,3 triliun. Seluruh anggaran MBG yang direncanakan Rp. 335 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pengelolaan program yang efektif dan terkoordinasi. Di satu sisi, alokasi anggaran sebesar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Namun di sisi lain juga, penggunaan dana pendidikan dan sektor lainnya dalam jumlah sangat besar itu dalam perspektif kebijakan dapat memengaruhi fokus

utama dalam sektor pendidikan, terutama pada peningkatan guru, penguatan riset, serta pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran (Basuki et al., 2026).

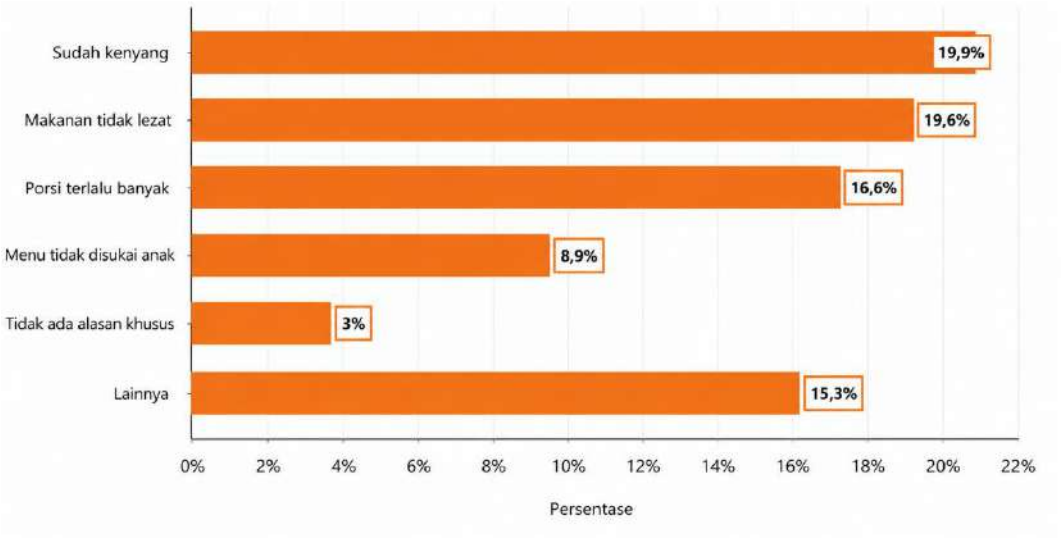
Grafik 1
Alasan Anak Umur 12-17 Tahun yang Tidak Menyukai MBG 2025



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 1.624 anak usia 12-17 tahun di 12 provinsi penerima program MBG yaitu, Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB, dan NTT menunjukkan bahwa aspek rasa dan kualitas makanan menempati persentase tertinggi sebagai faktor yang tidak disukai responden, yaitu sebesar 52%. Selain itu, 33,5% responden menilai menu kurang sesuai dengan selera, 22,1% mempermasalahkan jadwal makan, dan 13,5% kurang menyukai cara penyajian. Sementara itu, 17,8% memberikan jawaban lain, dan 6,4% menyatakan tidak ada masalah (Solichah, 2025).

Grafik 2
Alasan Anak Tidak Menghabiskan MBG 2025



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dilakukan survei dan sesi *Focus Group Discussion (FGD)* dengan responden anak. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktertarikan anak terhadap MBG. Ada sekitar 35,2% anak melaporkan pernah tidak menghabiskan MBG. Alasan yang paling umum adalah sudah merasa kenyang 19,9%, kualitas makanan yang buruk, seperti basi/tidak segar 19,6%. Adapun faktor lain termasuk rasa tidak enak 16,6%, hambar 8,9% dan ketidaksukaan terhadap menu 8%. Tanggapan FGD ini menegaskan ada beberapa bahan MBG cenderung tidak segar saat diterima anak, sehingga hal ini mempengaruhi minat untuk menghabiskan makanan.

KPAI menekankan bahwa fenomena anak yang tidak menghabiskan makanan dalam program MBG, harus diatasi dengan memahami kebutuhan anak berdasarkan kondisi kesehatan dan pengalaman di lapangan. KPAI juga mencatat bahwa alasan anak tidak menghabiskan makanan karena sudah kenyang, tidak suka dengan aroma makanan, atau bosan terhadap menu yang disajikan. Jika pelaksanaan

MBG terlalu kaku atau hanya mengikuti prosedur tanpa memperhatikan kesan negatif bagi anak maupun sekolah. Oleh karena itu, KPAI mendorong agar program MBG ini dijalankan dengan memperhatikan kesehatan gizi dan kebutuhan gizi tiap anak, sehingga makanan yang diberikan sesuai dengan kondisi kesehatan dan selera anak, dan akan mengurangi kemungkinan munculnya masalah baru di lapangan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2026).

Pelaksanaan Program MBG ini diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025. Perpres ini mengatur tata kelola operasional program agar lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Perpres ini menjadi lanjutan dari (Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional) Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur operasional MBG melalui Koordinator Pelaksana Program Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perpres Nomor 115 Tahun 2025 ini memperkuat struktur kelembagaan, koordinasi dan pengawasan program di tingkat daerah sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara merata, higienis, dan sesuai standar pelayanan.

Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar secara resmi di mulai pada 6 Januari 2025 dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar sembilan sekolah yang tersebar di tiga kecamatan. Tahap awal pelaksanaan ini merupakan kebijakan nasional dalam upaya peningkatan pemenuhan gizi peserta didik guna menunjang kesehatan serta mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang menjadi sasaran awal berada di kecamatan Mamajang, Panakkukang, dan Manggala, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 3.000 siswa. Data jumlah siswa masing-

masing sekolah menjadi dasar dalam memperkirakan cakupan distribusi makanan bergizi pada tahap awal pelaksanaan program (Alief, 2025).

Tabel 2
Sasaran Awal Penerima MBG 2025

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah Siswaa
1.	Mamajang	SDN Cendrawasih	340
2.	Mamajang	SD Sambung Jawa	292
3.	Mamajang	SMPN 1 Makassar	1.417
4.	Mamajang	SMAN 2 Makassar	1.143
5.	Mamajang	SMAN 3 Makassar	1.068
6.	Panakkukang	KB TKIT Wihdatul Ummah	52
7.	Panakkukang	SD Inpres Tamajene	293
8.	Panakkukang	SD Inpres Tamamaung IV	286
9.	Manggala	SMPN 17 Makassar	300
10.	Manggala	SMAN 10 Makassar	300

Sumber: Rakyat Sulsel.co.id, diolah oleh Penulis 2026

Pada tahap awal pelaksanaan program MBG, pemerintah membangun lima dapur umum yang tersebar di tiga kecamatan, yakni tiga unit di Kecamatan Manggala, serta masing-masing satu dapur di Kecamatan Mamajang dan Panakkukang. Setiap dapur memproduksi sekitar 3.000-3.500 porsi makanan per hari. Misalnya, di SMPN 1 Makassar ada 1.417 siswa dilayani dalam satu kali distribusi makanan (Alief, 2025).

Dalam pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan sekitar satu tahun, beberapa tantangan mulai muncul di berbagai daerah di Indonesia, seperti kendala dalam pengolahan dan distribusi makanan serta masih

adanya makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa. Hal tersebut terjadi juga di Kota Makassar, yaitu pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaporkan masih terdapat sisa makanan setelah pembagian kepada siswa. Menanggapi permasalahan tersebut, pihak sekolah dan pelaksana program memberikan hadiah kepada siswa yang menghabiskan makanan tanpa sisa sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan dalam mengonsumsi makanan yang telah disediakan (Fatir, 2025). Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program ini tercapai, khususnya dalam meningkatkan asupan gizi siswa melalui makanan yang disediakan. Program dapat dinilai efektif apabila makanan dapat diminimalkan. Selain itu, efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program, seperti anggaran, bahan makanan, serta tenaga pelaksana secara optimal agar pelaksanaan program tidak menimbulkan pemborosan.

Keberhasilan program MBG bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah berperan utama dalam memastikan distribusi makanan merata hingga ke wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, partisipasi orang tua dan guru juga diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi. Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan MBG melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Pemerintah berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan menunjuk perwakilan dan membentuk satuan tugas untuk memastikan pengawasan berjalan efektif (Pemerintah Kota Makassar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa

perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan dukungan teknis dan operasional di tingkat daerah.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **"Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif dan melihat bagaimana implementasinya program MBG di sekolah serta sejauh mana pelaksanaannya mampu mendukung pencapaian tujuan tersebut. Hasil evaluasi akan disusun dalam bentuk *policy brief* sebagai rekomendasi strategis bagi para pengambil kebijakan guna meningkatkan efektivitas program dan memastikan gizi siswa tercapai secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar?
2. Apa saja permasalahan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar.

2. Untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan program pelayanan publik di bidang gizi dan Kesehatan Masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sumber referensi atau acuan bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik mengkaji program pemenuhan gizi anak melalui kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tinjauan serta referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami pelaksanaan dan evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan program di masa mendatang.